MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
Jalan Bina Praja Timur (Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan), Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70732, www.pttun-banjarmasin.go.id, pttun.banjarmasin@gmail.com

Banjarbaru, 28 Juli 2025

Nomor : 899 / KPTTUN.W6-TUN/PR.01.04/VII/2025
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Di – Jln. Tjilik Riwut No.Km 5, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya
Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dimaksudkan untuk:
   a. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
   b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
   e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memperoleh nilai sebesar 80,60 atau A (kategori).
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00	
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,90	
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,45	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75	
Nilai Akuntabilias Kinerja			80,10	
			Predikat	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2024	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,90	
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,70	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	
Nilai Akuntabilias Kinerja			80,60	
			Predikat	A

No.	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1	Belum terdapat dokumen matrik pendanaan terkait perencanaan anggaran yang mendukung kinerja
2	Sudah terdapat dokumen perencanaan kegiatan, agar ditambahkan dengan dokumen Manajemen Risiko dalam pengelolaan isu strategis, IKU, PKT, RENSTRA, RENAKSI
3	Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan dipublikasikan tepat waktu
4	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART
5	Belum teridentifikasikan secara spesifik atas terjadinya crosscutting antar bagian yang saling berkaitan dalam mencapai kinerja organisasi
B. Pengukuran Kinerja	
1	Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan
2	Belum Terdapat monev Rencana aksi dan monev Capaian kinerja tahun 2024
C. Pelaporan Kinerja	
1	Perlu diberikan gambaran tujuan DIPA dengan tujuan untuk mencapai kinerja
2	data dukung tidak menggambarkan Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan pada website PTUN Palangkaraya
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja namun tidak ada penjelasan terjadinya penyesuaian penggunaan anggaran
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan namun belum dilaksanakan secara berjenjang.
2	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimamfaatkan secara optimal dalam mendukung efektifitas dan efesiensi kinerja
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan akan tetapi belum dilengkapi dengan hasil tindaklanjut dari tiap-tiap bidang
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah dilaksanakan oleh SDM yang memadai akan tetapi perlu ditambah SDM untuk mengikuti pelatihan SAKIP

No.	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1	Membuat matrik pendanaan terhadap rencana aksi yang dibuat
2	Membuat dokumen Manajemen Risiko dalam pengelolaan isu strategis, IKU, PKT, RENSTRA, RENAKSI
3	Mempublikasikan seluruh dokumen tepat waktu sesuai surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI
4	Membuat KAMUS IKU, dan surat pernyataan iku sesuai kreteria smart
5	Membuat Analisis identifikasi secara spesifik atas terjadinya crosscutting antar bagian yang saling berkaitan dalam mencapai kinerja organisasi
B. Pengukuran Kinerja	
1	Agar setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang yang berdasarkan data kinerja baik melalui Teknologi Informasi (Aplikasi) ataupun manual
2	Melakukan Rapat Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran untuk penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
3	Memamfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk menyusun strategi dan kebijakan di tahun berikutnya
C. Pelaporan Kinerja	
1	Agar memperjelas gambaran tujuan DIPA dengan tujuan untuk mencapai masing-masing Indikator kinerja
2	Melengkapi data dukung yang menggambarkan Dokumen Laporan Kinerja te

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	dipublikasikan pada website PTUN Palangkaraya
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan secara berjenjang dari tiap-tiap bagian
2	Memamfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara optimal dalam mendukung efektifitas dan efesiensi kinerja
3	Diperlukan tindaklanjut dari masing-masing bidang atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
4	Mengusulkan pegawai lagi untuk mengikuti pelatihan penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2024, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Terhadap hasil evaluasi atas kinerja tersebut Saudara/i diminta menyusun laporan hasil tindaklanjut evaluasi paling lambat pada bulan September 2025 dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin

Mohamad Husein Rozarius
NIP. 196009091987031007

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.